

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi tata tertib siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banjarmasin.

Implementasi tata tertib siswa Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banjarmasin dimulai dengan langkah-langkah penyusunan (perencanaan) draf tata tertib, yang dilakukan oleh Team kecil yang terdiri dari Kepala Madrasah, Wakamad Kesiswaan, dan Koordinator BK. Selanjutnya dibawa ke forum rapat dewan guru untuk disosialisasikan dan disempurnakan drafnya yang pada tahap akhir disepakati secara resmi ditingkat satuan pendidikan. Tahap berikutnya baru kemudian diperbanyak untuk disosialisasikan kepada siswa dan orang tuanya melalui rapat Komite Madrasah.

Walaupun dalam tahap-tahap perencanaan ini terdapat perbedaan, diantaranya dalam draf atau konsep tata tertib yang disusun, namun demikian secara umum langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perencanaan/perumusan tata tertib semua sama, yaitu menggunakan langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen Pendidikan, khususnya Pendidikan Islam yang lebih mengutamakan kaidah-kaidah keislaman untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Perumusan atau penyusunan tata tertib dalam prakteknya melibatkan berbagai pihak (kolektif), baik kepala madrasah sebagai pimpinan, wakil kepala madrasah, unsur guru, siswa bahkan dari orang tua. Selanjutnya hasil temuan dilapangan

menunjukkan bahwa implementasi tata tertib sekolah dimulai dengan sosialisasi tata tertib madrasah pada saat kegiatan-kegiatan resmi seperti upacara dan kegiatan Masa Orientasi Siswa (Matsama).

Selain itu tata tertib dilaksanakan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar dengan sistem poin dan melibatkan seluruh komponen madrasah. Tahapan terakhir dalam implementasi tata tertib adalah pengawasan yang dilakukan atas berjalannya tata tertib dan evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan tata tertib. terkait dengan pengawasan yang dijalankan selama ini pemimpin tidak melakukan pengawasan secara terprogram. Artinya pengawasan dilakukan hanya pada saat-saat penting saja.

Berdasarkan hasil dilapangan ditemukan adanya problematika yang dihadapi madrasah dalam implementasi tata tertib yang bersumber dari dua factor, yaitu faktor guru dan siswa. Hal ini karena ada guru yang tidak memberi sanksi kepada siswa sehingga sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan. Selanjutnya faktor dari siswa menunjukkan kurangnya kesadaran siswa untuk mematuhi tata tertib sekolah merupakan faktor penghambat dalam pembentukan disiplin siswa.

2. Peran Komite Dalam Implementasi Tata Tertib Siswa Madrasah Aliyah Negeri Di Kota Banjarmasin

Dalam menjalankan perannya dalam implementasi tata tertib komite MAN Banjarmasin lebih bersifat kondisional. Selama ini peran itu diwujudkan jika ada keluhan-keluhan maupun menyampaikan aspirasi masyarakat yang kemudian

disampaikan ke madrasah. Dalam konteks ini, walaupun peran yang dijalankan dalam implementasi tata tertib tidak signifikan, namun secara umum komite telah menjalankan fungsinya. Di sini peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, seperti tata tertib.

B. Saran-saran

Untuk memaksimalkan hasil penelitian secara lebih optimal, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata tertib dalam rangka mendisiplinkan siswa tentunya tidak hanya bergantung pada pihak-pihak tertentu, tetapi seluruh pihak (semua guru), karena hal yang terpenting dalam penegakan tata tertib adalah persoalan konsistensi dan kesadaran bahwa penegakan tata tertib merupakan tanggungjawab bersama.
2. Pengawasan yang dilakukan hendaknya lebih mengedepankan tipologi yang demokratis dengan memberikan pengawasan yang obyektif dan transparan.
3. Perlunya keterlibatan komite madrasah dalam implementasi tata tertib secara terstruktur dan terprogram dalam rangka budaya madrasah yang berakhlaqul karimah.